

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi Pemerintah

Strategi bisa dikatakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bintaro (dalam Rusdiananingtyas, 2006: 1899) mengartikan bahwa strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing; melawan siapa; dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing (Hamim, 2009: 73).

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan puncak yang befokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan (Ruung, 2014). Selain itu, stretegi juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah (Mahfudz, 2015: 5).

Sedangkan secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Ermaya Suradinata mendefinisikan sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara (Nawawi, 2015: 18). Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, Pramudji dalam (Rahayu, Rochmah, & Ribawanto, 2015: 123) mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah khusus memerintah sesuatunegara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti Kabinet merupakan suatu pemerintah).
3. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan)

Dalam hal keorganisasi pemerintah maka strategi dapat dirumuskan sesuai yang didefinisikan oleh Charles Hofer, Higgins (1985) yaitu Enterprise Strategy yang berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan demi kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinnya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera.

Mulgan (dalam Muhammad, 2012: 12) berpendapat bahwa *“Being strategic is neither natural nor easy for government”*. Jadi, untuk menjadi strategis bukanlah hal yang wajar dan tidak mudah bagi pemerintah, tetapi bukan juga hal yang mustahil untuk mencapainya. Oleh karena itu, disinilah diperlukan suatu usaha yang maksimal dan dukungan dari semua pihak sehingga segala yang dicita-citakan akan tercapai demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah pasti menginginkan daerah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan lebih maju dalam berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga sesuai dengan amanah dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 bahwa *“penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;”*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pun telah dibagi dalam dua tahap yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pada pasal 1 ayat 14 UU No 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, (1) *“Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. (2) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah”*.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;

- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

2.2 Masyarakat Melayu dan *Civic Culture*

Keberadaan identitas suatu bangsa tidak terlepas dari kebudayaan daerahnya masing-masing. Dimana budaya merupakan salah satu unsur penting dalam identitas suatu bangsa. Identitas bangsa Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan tentu mengakui perbedaan tiap daerah yang berupa budaya, bahasa, adat, kesenian dan lain sebagainya sebagai unsur pembentuk identitas nasional. Kebudayaan yang berasal dari setiap daerah secara utuh menjadi bagian dari budaya nasional yang turut membentuk kepribadian warga Negara (Mahardika & Darmawan, 2016: 24). Bangsa Indonesia sebagai bangsa Melayu harus memanfaatkan budaya Melayunya sebagai entitas dan jati diri bangsa. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan budayanya sendiri. Negara harus mempertahankan budaya warganegaranya agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri dan identitas nasional yang disebabkan masuknya dampak budaya asing yang mempengaruhi pola kehidupan bangsa Indonesia (Islamuddin, 2014: 56).

Disinilah peran penting pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian budaya nasional sebagai salah satu kearifan lokal. Dalam upaya pengembangan kembali kearifan lokal di masyarakat salah satu bidang yang mengkaji tentang budaya daerah atau nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam warganegara itu ialah *civic culture*. Sebenarnya, istilah *civic culture* diciptakan oleh Almond dan Verba pada tahun 1963 dalam bukunya *The Civic Culture* untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Melalui penggunaan teknik penelitian survei pada saat itu, Almond dan Verba melakukan pengkajian di lima negara, yakni Inggris, Jerman, Italia, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dalam kajian tersebut

terjadi perubahan studi politik komparatif yang menjauh dari kecenderungan eksklusif dengan analisis mendasar terhadap studi perilaku komparatif

Di Indonesia sendiri istilah *civic culture* tidak hanya terbatas hubungan politik dan sosial saja, akan tetapi diperluas lagi dengan hubungan antara politik, sosial, dan budaya. Menurut Winataputra (2012: 57), *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Selain itu, Budaya Kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan budaya yang mampu menopang masyarakat untuk hidup sesuai nilai-nilai budaya daerahnya (As'arie, 2011). Kemudian, Winataputra dan Budimansyah (2012: 233) mengemukakan bahwa *Civic Culture .. a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representation for the perpose of shaping civic identities* atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk membentuk identitas warga negara.

Selanjutnya Annisa (dalam Panjaitan & Sundawa, 2016: 65) *civic culture* atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan budaya kewargaan adalah rasa, sikap, dan perilaku yang mengarah pada keterikatan menjadi kesatuan komunitas atau masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan, moral, etika sehingga tumbuh kesadaran untuk bersama-sama membangun peradaban. *Civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari kaitan budaya komunitas (keluarga, suku, masyarakat lokal) dalam sebuah ikatan kewarganegaraan. Dalam hal ini, setiap warga negara yang ada di Indonesia harus mempunyai ide atau gagasan yang berkaitan dengan keluarga, suku, dan masyarakat lokal dalam membentuk sebuah ikatan warga negara Indonesia. Warga negara harus membentuk sebuah identitas sesuai dengan kesukuannya dengan dilandasi dengan pendidikan *multicultural* yang kuat agar tidak tercipta konflik dalam kehidupan warga negara. Adapun ciri-ciri dari *civic culture* menurut Mahardika & Darmawan (2016: 24) adalah sebagai berikut:

Nilai-nilai dalam warga negara, sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan Pancasila, civic virtue atau akhlak kewarganegaraan, adanya budaya yang menopang kewarganegaraan (berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kewarganegaraan untuk tujuan pembentukan identitas

warga negara), serta berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari budaya komunitas.

Civic culture dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan rasa nasionalisme warga negara karena *civic culture* merupakan budaya yang mampu menopang masyarakat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya daerahnya, dan nilai-nilai budaya tersebut yang menunjang masyarakat untuk menciptakan karakter dan identitas warganegara (As'arie, 2011).

Menurut Denny J.A. (2006:52) Kini *civic culture* ini digunakan sebagai label untuk merangkum berbagai nilai dan perilaku yang memperkuat institut demokrasi. Elemen *civic culture* itu antara lain: penghormatan atas kultur kompetisi dengan nama *fair play*; kemampuan bekerja sama dan sikap saling percaya (*Level of Trust, interpersonal Trust*) dalam interaksi sosial; sikap hidup yang toleran dan moderat; kompetensi teknis yang dibutuhkan warga negara yang aktif seperti kemampuan menyeleksi informasi dan berpikir kritis; *self determination* dan kepercayaan kepada sistem hukum serta institusi kenegaraan.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, otomatis dalam pelaksanaannya di masyarakat pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukanlah pendidikan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan budaya dengan cara memberikan pengetahuan mengenai budaya-budaya lokal yang terdapat dalam negaranya. Dan disini menurut (Derricott dan Cogan, 1998) Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang perbedaan-perbedaan budaya. Pada abad 21 terdapat 8 karakteristik warga negara sebagai berikut:

1. *the ability to look and approach problems as a member of a global society*
2. *the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society*
3. *the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences*
4. *the capacity to think in a critical and systematic way*
5. *the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner*
6. *the willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment*
7. *the ability to be sensitive towards and to defend human right (eg; rights of women, ethnic minorities, etc) and*
8. *the willingness and ability to participate in politics at lokal, national and international levels*

Dari pendapat di atas, dijelaskan bahwa karakteristik warga negara pada abad ke-21 adalah sebagai berikut: (1) Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, (3) kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, (4) kemampuan berpikir dan kritis dan sistematis, (5) memiliki kepekaan terhadap hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya), (6) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan, (7) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional (Derricott dan Cogan, 1998).

Keberagaman budaya yang ada bukan menjadi pemecah belah bangsa tetapi sebagai sarana penumbuhan sikap nasionalis di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengenal kembali budaya daerah masing-masing diharapkan mampu mengenal kembali karakter daerahnya dan tidak melupakan budaya asalnya karena budaya merupakan jati diri bangsa serta entitas nasional bangsa Indonesia. Dengan pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional akan mampu merefleksikan nilai-nilai baik lokal maupun nasional tersebut kepada peserta didik dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan rasa kebanggaan terhadap tanah airnya yang akan menimbulkan rasa cinta tanah air.

Oleh karena itu, salah satu pengembangan dari *civic culture* tersebut adalah budaya yang dikembangkan dalam lingkungan masyarakat yang berlandaskan kepada kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal, dalam hal keunikan dan keunggulan dalam kebudayaan masyarakat. Perpaduan semua unsur yang terdapat dalam masyarakat dan dijadikan sebuah identitas warga negara.

2.3 Civic Culture dan Pendidikan Kewarganegaraan

Berbicara tentang *civic culture*, tidak bisa dilepaskan dari *civic education*, sehingga *civic culture* merupakan salah satu sumber yang berperan penting dalam pengembangan *civic education*. Melalui *civic culture* (budaya kewarganegaraan) diharapkan setiap individu dan masyarakat mampu memahami lebih jauh

mengenai pendidikan kewarganegaraan. Winataputra (2006: 58) mengungkapkan bahwa identitas negara bersumber dari *civic culture* yang perlu dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Winataputra (2006:62) juga mengungkapkan unsur dari *civic culture* (budaya kewarganegaraan) adalah *civic virtue* atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/ egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Dan pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural yang menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Zuriah, 2012: 171).

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan dan negara. Adapun yang termasuk dalam objek studi *civics* adalah tingkah laku warga negara, tipe perumbuhan berpikir, potensi setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme dan nasionalisme) dan terakhir usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab warga negara (Somantri dalam Wahab & Sapriya, 2011: 316). Dari penjelasan diatas, maka Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam pertahanan dan pelestarian kebudayaan yang terdapat di dalam warga negara, yang dibuktikan adanya paradigma baru mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan kepada budaya warga negara (*civic culture*).

Winataputra dalam Wahab & Sapriya (2011: 215) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga domain yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosio-kultural. Domain akademis mencakup pemikiran PKn dalam lingkungan komunitas keilmuan. Domain Kulikuler yakni konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan non formal. Dan terakhir domain sosio-kultural yakni konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat. Pelestarian budaya dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam domain ketiga. Karena sosial kultural menunjukkan hubungan yang erat antara masyarakat dan kebudayaan. Suatu masyarakat tidak mungkin ada tanpa adanya kebudayaan, sedangkan kebudayaan hanya ada di dalam masyarakat (Saputra dkk, 2015: 3).

Civic culture berada dalam domain sosial kultural yang berorientasi pada pembentukan kualitas personal-individual warga negara. *Civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari kaitan budaya komunitas (keluarga, suku, masyarakat lokal) dalam sebuah ikatan kewarganegaraan. Maka dari itu hal ini merupakan anugerah jika sebuah bangsa memiliki kekayaan budaya yang beragam seperti Indonesia. Suku bangsa yang memiliki karakteristiknya masing-masing akan memiliki karakter sendiri yang dibingkai dalam harmoni kebhinekaan. *Civic culture* dalam konteks bangsa Indonesia, menggambarkan karakter warga negara Indonesia seperti layaknya yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

Peran *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) dalam mendidik warga negara yakni untuk menjadikan warga negara yang baik (a good citizen) secara universal dan diterima bagi setiap warga negara dengan mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa bentuk hak dan kewajiban dari seorang warga negara adalah pendidikan formal, melestarikan budaya lokal atau budaya masyarakat yang menjadi entitas bangsa Indonesia (Panjaitan & Sundawa, 2016: 66)

2.4 Sejarah Masyarakat Melayu Palembang

2.4.1 Definisi Melayu

Blumenbach, seorang ahli kebangsaan Jerman, membuat klarifikasi ras dari bangsa-bangsa di dunia meliputi lima kelompok, yaitu Kaukasia, Mongolia, Ethiopia, Amerika, dan Melayu-Polynesia mendiami Pulau Madagaskar (Malagasi), meliputi seluruh Kepulauan Nusantara terus ke Semenanjung Malaka, sampai ke Filipina, Taiwan (Formosa), dan pulau-pulau di sekitar Lautan Teduh (Husny dalam Simanjuntak & Bungaran, 2010: 9). Dunia Melayu dibangun dengan perpaduan unik antara gaya bercinta Hindu-Budha, yang belakangan ini dilapisi oleh asosiasi Islam yang kental dalam hal kesalehan, pendidikan, dan diplomasi (Chong, 2012: 89).

Istilah Melayu bukan suatu hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Secara bahasa, kata “melayu” diperkirakan muncul pertama kalinya dalam tulisan China antara tahun 644 – 645 M, disebutkan bahawa orang *mo-lo-yeu* mengirimkan utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. Kerajaan Melayu merupakan kerajaan besar dan luas pengaruhnya di pulau Sumatera pada zaman sebelum kerajaan Sriwijaya. Kata “melayu” juga dimungkinkan berasal dari kata “himalaya” artinya tempat bersalji. Dalam bahasa Jawa Kuno, ada kata “mlayu” artinya berlari atau mengembara. Ini merujuk kepada orang Indo-Melayu atau Austronesia yang bergerak mengembara dari Yunani (Mugiyono, 2016: 32)

Terdapat tiga pendekatan konsep Melayu. Pertama konsep Melayu yang menggunakan kesamaan bahasa dan budaya seperti yang terkandung dalam *Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Melayu secara fizikalnya berkulit ciku masak (sawo matang) yang terdiri dari pada pelbagai suku bangsa yang mendiami alam Melayu yang juga dikenali sebagai nusantara. Dari segi linguistiknya, Melayu bertutur dalam bahasa asasnya iaitu bahasa Melayu-Polinesia. Pendekatan kedua, yang menerangkan konsep Melayu ini ialah berasaskan kepada penggunaan nama Melayu itu sendiri. Menurut Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah nama Melayu dikatakan berasal dari nama Sungai Melayu di Bukit Siguntang yang terletak di Palembang Sumatera. Dan pendekatan ketiga, dalam mentafsirkan konsep Melayu ialah berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia yaitu pasal 160 yang menyatakan bahawa Melayu adalah seseorang yang beragama Islam (Abdul Rahman dalam Zain, 2011: 195).

Sementara itu Syed Husin Ali (dalam Awang Besar, 2011: 157), dari sudut sosiobudaya orang Melayu bukan saja terdapat di Semenanjung tetapi juga di tempat lain seperti kepulauan Filipina dan Indonesia yang disebut Nusantara. Walaupun bertutur dalam dialek dan logat serta agama yang berbeda, para sarjana beranggapan mereka ini berada pada rumpun yang sama. Dan menurut Hall (dalam Wahyudin, 2014: 48), istilah Melayu, maknanya selalu menunjuk kepada kepulauan Melayu yang mencakup kepulauan di Asia Tenggara. Istilah tersebut juga bermakna sebagai etnik atau orang Melayu Sumatera dan Semenanjung

Tanah Melayu dan tempat-tempat lain yang menggunakan bahasa Melayu. Orang-orang kawasan Melayu di setiap kawasan (pulau) meskipun berada di masing-masing daerah namun mereka merasa bersaudara sebagai entitas dan merasa memiliki kebudayaan Melayu. Secara budaya dan kawasan mereka memiliki alur budaya yang sama, namun tetap memiliki varian-varian yang menjadi ciri khas atau identitas setiap kawasan budaya Melayu (Takari dalam Wahyudin, 2014: 49).

Selain dijelaskan di atas, ada berbagai pendapat orang berkenaan dengan nama Melayu, diantaranya: a) Melayu itu berasal dari dua perkataan Mala dan Yu; Mala artinya mula, dan Yu artinya negeri; b) Melayu atau Melayur, yang berarti “Tanah Tinggi” dalam bahasa Tamil. Dalam bahasa sanksekerta terdapat perkataan Malaya, artinya “nama pohon yang harum yakni Gaharu” sebagai pujian yang menerangkan Malaya dahulu adalah negeri Gaharu yang terkenal; c) Melayu dalam bahasa Jawa berarti “deras” atau “lari”; d) Melayu berasal dari perkataan “Pemelayu” seperti Palembang dari pada Lembang; e) Ada lagi, “yu” bermakna “telur”, jadi Melayu berarti “mula telur” yaitu telur yang mula-mula (Simanjuntak & Bungaran, 2010: 10).

Orang Melayu berasal dari keturunan keluarga besar Austronesia/Nusantara yang tergabung di dalamnya orang Jawa, Sunda, Bugis, Cebu, Visaya, Tausug, Hawaii, Dayak, Maori, Tonga, Merina, Cham dan ratusan bahkan ribuan lagi etnik. Mereka memiliki bahasa yang saling berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan mereka berasal dari induk yang sama. Secara geografis diketahui bahwa hampir seluruh wilayah budaya Melayu berada di kawasan khatulistiwa (*equator*) yang sekaligus ditandai oleh ekologi alam beriklim hujan lebat sepanjang tahun dalam dua musim angin dan bumi yang dipenuhi oleh hutan hijau berpayo di sekitar pesisir pantai. Bertempat di kepulauan dan pesisir, menjadikan kebudayaan Melayu terbuka terhadap pengaruh luar dan asing yang secara fleksibel menerima serta meresapi berbagai unsur itu untuk dipadukan menjadi budaya Melayu dalam proses asimilasi yang dinamik dan kreatif sebagai budaya Melayu (Arifullah, 2015: 126-127).

2.4.2 Masyarakat Melayu Palembang

Suku Melayu umumnya mendiami wilayah Kepulauan Riau, Semenanjung Melayu (Malaysia), pulau-pulau yang menyebar sampai laut Cina Selatan dan kemudian Riau daratan di Pulau Sumatera. Di daerah ini sangat terkenal karena kemashorannya dengan dilintasinya pedagang-pedagang asal negeri Cina, India, Arab, Eropa termasuk pedagang pribumi sendiri yang memasarkan hasil buminya di pelabuhan Malaka. Waktu itu tentunya bisa kita bayangkan betapa pentingnya peranan kerajaan Melayu yang dikenal mendunia (Bunari, 2010: 21). Dunia Melayu, terdiri atas kelompok etnik Melayu dengan berbagai cabang subkultur (Melayu Semenanjung, Melayu Riau, Melayu Palembang, Melayu Minangkabau dan lain-lain) (Maryamah, 2013: 3). Secara umum kebudayaan dari suku bangsa Melayu tersebut memiliki persamaan, perbedaannya yang utama kelihatannya adalah dalam bentuk bahasa, yakni dalam pengucapan (dialek). Hal ini dikarenakan adanya percampuran dengan bahasa-bahasa dari suku bangsa lain. Dialek Melayu ini akan berubah bila ke arah selatan, di mana tekanan pada huruf “o” akan keras kedengarannya. Dan bila ke arah utara tekanan kata “o” tidak kedengaran lagi, tetapi tekanan pengucapan pada huruf “e” (Simanjuntak & Bungaran, 2010: 11).

Sejalan dengan itu, untuk mendukung keberadaan suku Melayu di Indonesia dinyatakan bahwa terdapat beberapa tempat di Nusantara yang dipandang sebagai pusat sastra Melayu, misalnya Jakarta, Riau, dan Palembang (Rukmi, 2005: 149). Orang Melayu biasanya dikaitkan dengan masyarakat yang tinggal di Palembang dan sekitarnya (Wahyudin, 2014: 48).

Bahkan untuk memperkuat keberadaan Melayu di Palembang dalam penelitian yang di lakukan oleh Zakaria (2005: 324) mengatakan bahwa keturunan raja-raja Melayu itu bernasabkan dari Palembang (dalam sejarah Sriwijaya) yang merupakan pusat kebudayaan Melayu pertama. Dan, raja-raja Melayu yang awalnya di sekitar Selat Melaka, Palembang, Bentan, Singapura, Melaka, dan Johor adalah secara langsung atau pun tidak langsung merupakan nasab keturunan dari Iskandar Zulkarnain (tokoh legenda Islam), dan Raja Chola (tokoh legenda Hindu). Bahkan, Marsden (dalam Maxwell, 2001: 183) mengungkapkan bahwa:

Negara asal yang dihuni oleh ras Melayu adalah Kerajaan Palembang di Pulau Indalus, sekarang Sumatera di Sungai Malayo yang mengalir

dari Gunung Mahameru dan pembuangan terakhir ke Sungai Tatang (dimana Palembang berdiri) sebelum bergabung dengan laut.

Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, merupakan kota tertua yang ada di Indonesia (Utomo dkk, 2012: vii). Kota yang terkenal dengan Jembatan Ampera dan makanan khas pempek ini dulunya merupakan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mempunyai kekuatan politik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, Palembang berubah menjadi sebuah Kerajaan Islam yang kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Palembang Darussalam (Husna, 2016)

Sejak pertama kali dibangun oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tanggal 16 Juni 682 M, maka Kota Palembang hari ini telah berusia 1382 tahun. Suatu usia yang sudah sangat dewasa untuk ukuran sebuah kota. Kita boleh berbangga karena Palembang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki “akte kelahiran”, yang proses kelahirannya dicatat dalam sebuah batu kali yang dikenal dengan nama Prasasti Kedukan Bukit (Utomo, 2012; iii). Prasasti Kedukan Bukit sendiri adalah dokumen fisik tertua yang menggunakan bahasa Melayu Kuno, yang ditemukan oleh seorang pegawai Belanda bernama M. Batenburg pada tahun 1920, di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini menjadi penting karena di dalamnya ada tercatat nama “Sriwijaya”, sebuah empayer maritim legenda terkenal di Asia Tenggara (Srikandi, 2015: 54). Sebagaimana yang kita tahu, sebagai salah satu Kerajaan Melayu-Budha, Kerajaan Sriwijaya pernah mencapai puncak kejayaan pada abad 9-10 M dengan menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuasaan yang hampir menyeluruh di seluruh kawasan Asia Tenggara seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam juga Filipina. Sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya, kejayaan Kota Palembang kemudian terus berlanjut pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam sendiri merupakan salah satu Kesultanan Melayu-Islam yang memainkan peran tidak sedikit bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan Nusantara. Hal ini sejalan dengan pendapat Samin (2015: 72) mengungkapkan bahwa:

Palembang menginjak kejayaan pada paruh kedua abad ke-18. Sultan Muhammad Badaruddin II memerintah bijaksana dan membuka peran timah yang luas, pelabuhannya menjadi antar pulau dan antar benua, hubungan ke Jawa, Riau, Malaka dan Cina sudah sejak lama dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Palembang melanjutkan kejayaan Sriwijaya.

Tak sampai di situ saja, peradaban Melayu semakin gemilang manakala bahasa Melayu menjadi *lingua-franca* yang dituturkan sebagai bahasa perdagangan dunia. Para pedagang Cina dan India misalnya, menjadikan bahasa Melayu sebagai medium penuturan yang digunakan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Sampai saat ini, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa keempat dunia yang dituturkan lebih kurang 250 juta orang (Srikandi dkk., 2015: 21). Bahasa Melayu dapat terus bertahan karena keistimewaan yang terdapat pada bangsa Melayu itu sendiri. Orang Melayu yang dilahirkan dari keluarga Melayu biasanya akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibundanya (Che Mat, 2013: 78).

Dan masyarakat Palembang, dalam kesehariannya berkomunikasi dalam bahasa Palembang. Bahasa ini dikategorikan sebagai bahasa Melayu atau lebih dikenal dengan sebutan bahasa Melayu Palembang. Bahasa ini terdiri atas dua dialek, yaitu *baso Palembang alus* dan *baso Palembang sari-sari*. Bahasa ini hampir mirip dengan bahasa-bahasa Melayu lainnya seperti bahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu Malaysia. Hal yang membedakan bahasa ini dengan bahasa Melayu lainnya adalah pada penggunaan dialek “o”.

Jika kita melihat sejarah dari kerajaan-kerajaan Melayu, memang kebanyakan dari kerajaan-kerajaan tersebut memiliki wilayah kekuasaannya tersebar di hampir seluruh wilayah pesisir (*maritime based*). Ambil contoh saja Kerajaan Funan dan Kerajaan Sriwijaya, dua kerajaan Melayu terbesar dalam sejarah, keduanya diketahui merupakan kerajaan bercorak maritim, bukan kerajaan yang *agraria based* atau *land based*. Dengan karakternya yang *maritime based* ini lah yang kemudian mengantarkan kerajaan-kerajaan Melayu tersebut berhasil menjadi kota metropolis pada masanya (Isjoni dalam Sunandar, 2015: 62).

Sudah maffhum kita ketahui, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah hadir secara politis di tanah air (Irwanto & Santun, 2013: 136). Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pelabuhan transit dagang pada masanya. Letak geografisnya yang strategis telah menjadikan Sriwijaya sebagai

pelabuhan penting dalam jalur dagang laut, yang disinggahi oleh saudagar yang berasal dari berbagai bangsa. Sriwijaya dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang sebagian besar penghasilannya dari perdagangan dan cukai. Selain sebagai negara importir, negara ini juga sebagai negara eksportir. Begitu banyak jenis komoditi ekspor yang dimiliki oleh Sriwijaya. Ke negeri Arab, Sriwijaya mengeksport hasil hutan (kayu gaharu, cendana, sapan, kemenyan, kapur barus dan gading gajah), hasil tambang (timah dan emas), dan hasil bumi (rempah-rempah). Ke negeri Tiongkok, Sriwijaya mengeksport hasil hutan (gading gajah, cula badak, kemenyan dan kapur barus), hasil tambang (emas dan perak), hasil industri (cincin kristal, gelas, kain katun, air mawar, gula putih, obat-obatan dan wangi-wangian), hasil bumi (buah-buahan dan bumbu-bumbuan) (Van Leur dalam Utomo dkk., 2015: 122-123). Berkat keuntungan yang menumpuk inilah, penduduk Sriwijaya kian hari kian makmur. Bahkan menurut legenda yang berasal dari Cina, dikatakan bahwa saking begitu kayanya para penguasa di Kerajaan *Shi li fo si* (begitu mereka menyebut Sriwijaya), hingga pada tiap hari jadinya, Sang Raja nan Agung itu senantiasa membuang sebungkal emas ke dalam kolam di lingkungan keraton kerajaan. Demikian pula dengan Kesultanan Palembang Darussalam, yang juga memainkan peran penting dalam sejarah perdagangan di Nusantara.

Tumbuh dan berkembangnya kerajaan Melayu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama buddha masuk diperkirakan sekitar awal abad Masehi, melalui pantai Timur Jambi dan menyusuri sungai Batanghari dan sungai Musi (Hasan, 2015: 30). Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Palembang juga sudah dikenal sebagai pusat pengajaran agama Budha pada masa itu. Berbagai ahli agama Budha dari mancanegara datang ke Palembang untuk belajar. Berbagai tinggalan budaya yang berhubungan dengan ajaran Budha banyak ditemukan di Palembang, misalnya Bukit Siguntang, Sarangwaty dan Gedung Suro. Hal itu kemudian terus berlanjut di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pada waktu itu, antara abad ke-18 – 19 M, agama Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Nusantara. Dan sekali lagi, Palembang berhasil menjadi pusat syiar agama Islam dan juga pusat sastra Islam. Singkatnya, Palembang sejak awal berdirinya selalu menjadi pusat syiar agama, mulai dari agama Budha hingga agama Islam (Utomo dkk., 2015: viii-ix).

Demikianlah, kedekatan dengan Islam telah mengantarkan Melayu Palembang menjadi kesultanan yang sangat berpengaruh dalam percaturan politik dan budaya di Tanah Air kemudian. Dari daerah ini, muncul sosok ulama yang menjadi guru bagi para penuntut ilmu agama yang terdapat di Haramain (Makkah dan Madinah), yaitu Syeikh Abdus Shomad Al-Falimbani (1704 – 1789 M). Dan dalam perkembangan selanjutnya, Palembang terus menjadi kota yang sangat religius. Bahkan disebutkan dalam sebuah Laporan Tahunan Residen Palembang, masyarakat muslim Palembang dilaporkan bersifat ‘fanatik’ terhadap Islam. Hal ini digambarkan dengan kehidupan sosial keagamaan dalam tahun 1880-an melalui ungkapan “untuk 60.000 penduduk kota fanatik yang mengaji Koran (Qur’an) dengan suara keras” (Peeters, 1997: 6).

Tidak hanya itu saja, *Martin van Bruinessen* mencatat dalam bukunya bahwa di antara semua bangsa yang berada di Makkah orang Jawi (Asia Tenggara) merupakan salah satu kelompok terbesar sejak tahun 1860, sehingga bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah. Mereka yang bermaksud untuk menuntut ilmu, setelah melaksanakan ibadah haji biasanya menetap di Makkah untuk beberapa tahun lamanya. Di sinilah mereka menjadi *transmitter* utama tradisi intelektual-keagamaan dari pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah ke Nusantara, yang pada akhirnya memberikan pengaruh luar biasa dalam pengembangan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial keagamaan hingga kita rasakan saat ini (Azra, 20015: 17)

Dari beberapa penjelasan singkat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Melayu dengan peradabannya telah mampu menjawab persoalan zaman, menjadi identitas pemersatu dan menjadi arah kebijakan politik. Pencapaian tersebut tentu saja disebabkan oleh pengalaman panjang bangsa Melayu, sehingga ia tidak hanya sebagai entitas etnis, bangsa, atau budaya semata, melainkan suatu peradaban yang sangat luhur sehingga dapat mencerahkan bangsa ini.

2.5 Program Palembang EMAS 2018

2.5.1 Profil Palembang

Palembang merupakan kawasan yang memiliki sejarah penting dalam peradaban besar dan tua di Nusantara. Sebelum terbentuknya Kesultana Palembang Darussalam, di kawasan ini telah muncul kerajaan besar yang mempengaruhi jalannya sejarah di kawasan Asia Tenggara, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Suwarnabhumi. Kedua kerajaan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam percaturan politik di kawasan ini, melainkan juga melibatkan bidang pelayaran dan perdagangan yang mampu melibatkan kaum dagang di berbagai bangsa (Nawiyanto & Endrayadi, 2016: 15)

Kota Palembang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim (<http://www.palembang.go.id/35/geografis-kota-palembang>).

Di tengah kota mengalir Sungai Musi, di sisi selatannya merupakan daerah dataran yang berawa-rawa dengan sebuah bukit kecil yang tingginya sekitar 15 meter d.p.l. Bukit kecil yang dikenal dalam kitab *Sejarah Melayu* itu disebut dengan Gunung Mahamiru. Daerah ini pada masa sekarang daerah paadt hunian dengan rumah-rumah yang di bangun di atas *rawa-rawa*. Pada sisi Utara Sungai Musi merupakan suatu dataran yang makin meninggi ke arah utara sungai. Daerah tertinggi di Kota Palembang terletak di sebelah utara kota (sisi utara Sungai Musi) menuju ke arah Talang betutu. Bukit Siguntang yang sudah di kenal dalam Kitab *Srjarah Melayu* terletak di sebelah barat laut kota. Bukit yang tingginya 26 meter d.p.l ini merupakan tempat yang tertinggi di Kota Palembang (Utomo dkk, 2015: 1)

Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21°– 32° Celsius, curah hujan 22 – 428 mml per tahun. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi. Pada tahun 2003 suhu udara rata-rata berkisar antara 23,9°-32° Celsius, 24,04°-32,60° Celsius (2004), 22,44°-33,65° Celsius (2005), 26,4°-28,9° Celsius (2006) dan

21,2°-35,5° Celsius (2007). Pada tahun 2007, curah hujan terbesar jatuh pada bulan April dengan jumlah curah hujan 540 mm³. Sedangkan kelembaban udara tahun 2007 rata-rata 80%, kecepatan angin rata-rata 20 km/jam dengan arah terbesar dari arah barat laut, serta tekanan udara rata-rata di permukaan laut sebesar 1009 mbar dan di daratan sebesar 1007,5 mbar. Kawasan lindung yang ada di Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutan (5,68%) dan rawa (3,83%). Untuk hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis gunalahan, diantaranya adalah kawasan cagar alam (46,91 Ha) dan kawasan cagar budaya (21,75 Ha) (<http://www.palembang.go.id/35/geografis-kota-palembang>).

Dengan kondisi kota yang di kelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air maka maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:

- Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
- Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
- Daerah pesisir timur laut.

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya

sebagai kesultanan yang disegani di kawasan Nusantara (<http://www.palembang.go.id/37/sejarah-kota-palembang>)

2.5.2 Palembang EMAS 2018

Kalau kita perhatikan gerak langkah pembangunan yang terjadi di beberapa negara khususnya negara-negara maju, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut sehingga kemudian bisa menjadikan mereka sebagai negara-negara yang maju, yaitu kebanyakan dari mereka menempatkan kebudayaan mereka sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang akan mereka lakukan.

Kita ambil contoh Jepang misalnya, yang dulunya pernah terpuruk akibat kehancuran dalam bidang ekonomi dan politik pasca Perang Dunia II. Hari ini kita bisa menyaksikan bahwa Jepang berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu pilar ekonomi dunia dan negara dengan kemajuan teknologi terdepan. Namun walau demikian, kebudayaan Jepang tidak hilang dari kehidupan masyarakatnya. Bangunan kebudayaan yang telah tertanam dalam jati diri warga dan pemerintah Jepang benar-benar berhasil menjadikannya sebagai salah satu negara yang kuat. Hal itu bisa kita saksikan juga ketika terjadi bencana Tsunami tahun 2011 yang memporak-porandakan negeri “Tirai Bambu” tersebut, namun lagi-lagi Jepang dengan cepat berhasil bangkit dari keterpurukan itu. Dan ini sekali lagi salah satunya disebabkan oleh keteguhan dari warga dan pemerintahnya yang teguh memegang nilai-nilai kebudayaan Jepang.

Begitu pula dengan yang terjadi di negara-negara lain, tidak hanya di Asia seperti Korea Selatan dan China. Di benua Eropa misalnya, kita saksikan bagaimana kebudayaan Yunani dengan semangat *Hellenisme*-nya merupakan sumber spirit utama dalam program-program pembangunan yang mereka lakukan. Semangat-semangat kebudayaan seperti ini juga yang kemudian mengilhami Eropa untuk melakukan gerakan pencerahan pada abad pertengahan, yang kalau di Jerman kita kenal dengan istilah *Renaissance* atau *Aufklarung*.

Negara Indonesia sendiri dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat menghormati dan melindungi keberagaman budaya yang ada di nusantara. Ini jelas terdapat dalam Pasal 18 B ayat 1 dan 2

yakni: (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam upaya pelesatarian budaya diperjelas kembali dalam pasal 32 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada Bab XII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Selain pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah Indonesia juga merealisasikan hal tersebut dengan pembuatan peraturan perundang-undangan No 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Sehingga, Pemerintah daerah dapat mengembangkan prakarsa, inisiatif dan potensi yang dimilikinya dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, responsif, akuntabel dan nonpartisan. Setiap daerah diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pelayanan publik di daerahnya. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah (Yoserizal & Yudiatmaja, 2010: 90). Dan akhirnya dengan adanya Otonomi Daerah tersebut diharapkan mampu menopang pererkonomian negara demi kemajuan negara Indonesia. Amanah itu pun mendorong kota-kota yang ada di Indonesia untuk berlomba-lomba untuk memasarkan kotanya, baik untuk menarik investor maupun wisatawan sehingga memberikan penghasilan kepada kota tersebut (Dewi, 2016: 118).

Selanjutnya kalau kita berbicara tentang Palembang, masyarakat Kota Palembang jika kita lihat dalam lintasan sejarah, sesungguhnya merupakan masyarakat yang kaya akan nilai-nilai budaya. Hal itu sudah berlangsung sekian lamanya, yakni mulai dari zaman Kemaharajaan Sriwijaya hingga zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Dan kota Palembang seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan salah satu kota yang tidak bisa dilepaskan dengan peradaban Melayunya.

Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kota Palembang. Melalui Program Palembang EMAS 2018, Pemerintah Kota Palembang benar-benar bertekad menjadikan Palembang sebagai Kota Melayu yang berperadaban tinggi dengan nilai-nilai kemelayuannya. Sebelumnya, Peraturan Daerah (Perda) yang mengarah pada penggalian nilai-nilai budaya sudah ditetapkan sejak tahun 2009 yang lalu, yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat serta Pembentukan Lembaga Adat. Perda ini harus diapresiasi dan dilaksanakan untuk terus menggali nilai-nilai budaya Melayu yang terdapat di daerah Palembang.

Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini berupaya memposisikan Melayu dalam kacamata sejarah, budaya dan politik dengan harapan dapat memberikan sebuah formula di tengah kehidupan yang semakin kompleks akhir-akhir ini. Identitas sebagai Melayu menjadi sangat penting dalam percaturan politik dan arah kebijakan pemerintah dalam membangun daerah. Kebijakan politik melalui Undang-undang Otonomi Daerah telah memberikan ruang kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Daerah-daerah Kepulauan Melayu termasuk Palembang sangat penting memanfaatkan momen ini, walau sebetulnya kebijakan politik yang berorientasi pada pengembangan budaya Melayu sudah lama kita lakukan, namun peningkatan kuantitas dan kualitas pengembangan daerah tentu akan terus kita lakukan ke depan. Kota Palembang sebenarnya sejak lima tahun terakhir telah menjadi kota percontohan bagi provinsi lain karena telah mampu menjadikan kota Palembang yang megah bernuansa kota tua. Telah memperoleh lima tahun berturut-turut piala Adipura dan banyak lagi penghargaan lainnya (Yunani, 2013: 48).

Program Palembang EMAS 2018 adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Palembang di hari jadinya yang ke-1333, tanggal 17 Juni 2015. EMAS sendiri merupakan singkatan dari Elok, Madani, Aman, Sejahtera. Secara historis, EMAS (Gold) merupakan lambang Kerajaan Sriwijaya atau masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Sehingga secara sosiologis, dengan visi Palembang EMAS, dicita-citakan kondisi masyarakat Kota Palembang untuk mencapai kondisi terbaik dalam kemakmuran dan kejayaan (RPJMD Kota Palembang

Tahun 2013-2018). Dengan ikon jembatan Ampera untuk mewujudkan Palembang kota Internasional. Ini tentu saja merupakan komposisi yang lengkap untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang ideal, dan terlebih lagi ini merupakan karakter khas yang dimiliki oleh bangsa Melayu.

Program ini merupakan visi dan misi walikota Palembang saat ini di jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan. Program ini kemudian di uraikan lebih jelas dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Dan berikut ini, akan peneliti paparkan secara ringkas terkait rincian dari Program Palembang EMAS 2018 tersebut, yang mana ini kami ambil langsung dari portal resmi Pemerintah Kota Palembang (<http://palembang.go.id>):

1. Elok

Elok berarti bersih, indah dan menawan. Kata Elok disini artinya adalah Kota Palembang harus memiliki lingkungan hunian dengan penampilan yang bersih, indah sehingga menawan untuk dilihat. Masyarakatnya ramah, bersahabat, aman dan menarik untuk orang melakukan berbagai aktivitas kehidupan baik aktivitas ekonomi/bisnis, politik, pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, wisata dan pengembangan teknologi inovasi dan kreatif.

2. Madani

Madani berarti masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman dan berilmu. Madani disini adalah masyarakat Kota Palembang yang tertib dan aman karena patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi karena mengedepankan kesederajatan, transparansi dan demokrasi, berkeadilan sosial karena memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

3. Aman

Situasi aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan, dimana masyarakat Kota Palembang terbebas dari segala gangguan yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktifitas masyarakat. Dengan terwujudnya rasa aman, maka seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dan memperoleh kebutuhan dasarnya dalam suasana kondusif yang pada akhirnya juga menarik dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Palembang.

4. Sejahtera

Sejahtera mengandung arti makmur dan berkeadilan, artinya adalah Kota Palembang harus jaya atau adil makmur dan sejahtera baik lahir maupun batin. Masyarakat Kota Palembang harus sehat jasmani dan rohani, memiliki kecukupan ekonomi, terpenuhinya hak-hak dasar hidup manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban dan keadilan sosial.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Pengembangan Budaya Suku Talang Mamak sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam bagian Civic Culture (Studi Etnografi pada masyarakat suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau). Penelitian ini dilakukan oleh Islamuddin tahun 2014, yang di terbitkan dalam jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.

Degradasi kebudayaan dan kearifan lokal yang menyebabkan menculnya gejala krisis jati diri dan krakter bangsa, rendahnya pengetahuan mengenai kebudayaan, dan Rendahnya plestarian kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini ini mendiskripsikan budaya suku Talang Mamak dalam bagian civic culture, mendiskripsikan kearifan lokal dalam bagian civic culture, Pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal suku Talang Mamak dan Kendala dan Upaya dalam pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat suku Talang Mamak.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa budaya masyarakat suku Talang Mamak merupakan bagian dari civic culture dibuktikan dengan adanya nilai-nilai civic culture, kearifan lokal masyarakat suku Talang Mamak bagian dari civic culture dengan adanya nilai-nilai civic culture, pelestarian dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai kebudayaan Talang Mamak, mengikuti lomba antar kebudayaan, dan festival kebudayaan. Kendala dalam pelestarian meliputi: faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor transporatasi.

Relevansi dengan tesis saya yaitu bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan upaya pelestarian civic culture dikaji dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat suku Talang sama, sedangkan penelitian tesis saya membahas

mengenai upaya dari pemerintah dalam mengembangkan civic culture budaya Melayu Palembang di kaji dari Program Palembang EMAS 2018.

2. Civic of Culture: Media, Kaum Muda, dan Mengenal Ke-Istimewaan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Firly Annisa pada tahun 2015, yang diterbitkan dalam jurnal KOMUNIKATOR.

Media-media nasional di Indonesia memiliki kemampuan modal yang kuat. Selain itu memiliki infrastruktur teknis yang canggih, sumber daya manusia yang beragam dan dekat dengan kekuatan pemerintah pusat. media turut berperan dalam mewarnai civic culture dalam masyarakat sebuah bangsa. Media televisi turut membentuk mental dan cara berpikir, karena media adalah salah satu referensi untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan. Penelitian ini mengamati apakah media lokal melalui tayangan medianya telah meningkatkan kebanggaan, rasa memiliki serta kohesivitas masyarakat khususnya kaum muda atau sebaliknya. Dan bagaimana TV lokal yaitu Jogja TV dan media cetak Koran yaitu Kedaulatan Rakyat dalam menampilkan kekhasan-keunikan kebudayaan Yogyakarta dalam membentuk Civic Culture dan bagaimana pemahaman kaum muda mengenai Civic Culture.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi media secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Kehadiran media lokal telah memberi ruang nyata pada kebudayaan DIY dalam menampilkan wawasan kearifan lokal. Namun, tayangan media lokal belum menyentuh pada hal-hal mendasar kebudayaan yang kaum muda pahami saat ini, yaitu media sebagai perekat perbedaan dalam masyarakat Yogyakarta yang multikultur. Tayangan-tayangan media lokal masih berkulat pada kemasam kebudayaan yang ketinggalan zaman dan kurang “berbicara” pada konteks kekinian; seperti kenyataan toleransi beragama mulai terdegradasi, lemahnya enggang rasa di jalan raya, sampai melunturnya kesadaran bersama menjadi warga Yogyakarta yang hidup dalam wilayah kota yang semakin modern dan kosmopolit.

Relevansi dengan penelitian tesis ini yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai promosi dan pelestarian budaya daerah sebagai civic culture masyarakat

melalui Media dalam hal ini TV lokal. Sedangkan penelitian tesis saya membahas strategi dari pemerintah dalam pengembangan civic culture masyarakat Melayu Palembang yang usahanya tersebut bisa dilihat dari berbagai program yang tidak hanya terfokus pada media seperti TV lokal saja.

3. Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang dalam Kampanye Program Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera). Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Dewi dan M. Masri Hadiwijaya pada tahun 2016, yang dipublish dalam jurnal Komunikasi.

Perencanaan komunikasi merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dalam program komunikasi maupun program-program pembangunan yang memerlukan dukungan komunikasi, termasuk dalam mem-branding Kota. Sebagai salah satu bentuk kegiatan memasarkan Kota, aktivitas ini tidak luput dari perencanaan komunikasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji aktivitas perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam mengkampanyekan program Palembang EMAS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam kampanye Palembang EMAS terdiri atas dua langkah utama yaitu penguatan organisasi yang menggerakkan kegiatan dan publik yang menjadi sasaran kegiatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam komponen organisasi terdiri dari analisis situasi. Kemudian, melalui analisis tersebut diturunkan dalam sebuah rumusan kebijakan Palembang EMAS. Selanjutnya, setelah dilakukan perumusan kebijakan, pemerintah Kota Palembang melakukan perencanaan program dimana didalamnya telah termasuk penetapan anggaran, SDM, maupun fasilitas lainnya. Langkah terakhir dalam komponen organisasi adalah melakukan kegiatan komunikasi baik dilakukan secara tatap muka maupun komunikasi melalui beragam media seperti media luar ruang, media massa, maupun social media. Selanjutnya, pada komponen publik, dilakukan langkah feedback dan evaluasi. Umpan balik didapatkan melalui aktivitas focus group discussion (FGD), sedangkan evaluasi dilakukan secara triwulan, semester dan tahunan. Dimana hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dalam rangka perbaikan, peningkatan maupun penyesuaian program kampanye Palembang EMAS.

Relevansi dengan penelitian tesis ini yaitu sama-sama membahas mengenai program Palembang EMAS 2018 akan tetapi dalam penelitian sebelumnya hanya sebatas promosi dan kampanye program Palembang EMAS 2018 saja belum menyentuh pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai implementasinya di masyarakat demi mensukseskan program tersebut, yang akhirnya dapat mengembangkan *civic culture* masyarakat Melayu Palembang.